

---

## **Analisis Sistem Pembayaran Dana Operasional RT dan RW Kelurahan Cipedak**

**Septi Nurma Pratiwi<sup>1\*</sup>, Indah Pertiwi<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Pamulang

Email: <sup>1</sup>septi.nurmaa@gmail.com, <sup>2</sup> ind4h.pertiwi@gmail.com

**Article History: Received on 2020-11-12, Revised on 2020-12-1, Published on 2020-12-19**

### **ABSTRACT**

*The objectives of this research are 1) Knowing the implementation of the RT and RW operational fund payment system in cash 2) Knowing the application of the non-cash RT and RW operational fund payment system 3) Knowing the lack of an RT and RW fund payment system cash and non-cash and 4) Knowing the advantages of the cash and non-cash payment system for RT and RW funds. This research method is qualitative. The data collection technique is done by interview and documentation. This study's results were that the payment of operational funds for RT and RW in 2015 was disbursed quarterly in cash, and in 2016 a non-cash disbursement was made every month. The advantages and disadvantages of the RT and RW operational fund payment system are: in cash, the shortfall is impractical, and the network is constrained in non-cash. Cash benefits: stay in touch with RT and RW and sub-district parties and practical non-cash terms.*

*Keyword: Accounting, Citizens, Information Accounting System*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui penerapan sistem pembayaran dana operasional RT dan/atau RW secara tunai 2) Mengetahui penerapan sistem pembayaran dana operasional RT dan/atau RW secara non-tunai 3) Mengetahui kekurangan sistem pembayaran dana RT dan/atau RW secara tunai dan non-tunai dan 4) Mengetahui kelebihan sistem pembayaran dana RT dan/atau RW secara tunai dan non-tunai. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini pembayaran dana operasional RT dan/atau RW pada tahun 2015 pencairan dilakukan pertiga bulan sekali secara tunai dan pada tahun 2016 dilakukan pencairan setaip bulannya secara non-tunai. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam sistem pembayaran dana operasional RT dan/atau RW, yaitu: secara tunai kekurangannya tidak praktis dan secara non-tunai terkendala jaringan. Kelebihan secara tunai: bersilatuhrahmi dengan RT dan/atau RW dan pihak kelurahan dan secara non-tunai praktis.

Kata Kunci : Akuntansi, Dana Operasional RT RW, Sistem Informasi Akuntansi

### **Cara mengutip:**

Pratiwi, S.P., & Pertiwi, I. (2020). Analisis Sistem Pembayaran Operasional RT dan RW Kelurahan Cipedak. *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPIA)*, 1 (1), 14-19

## PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 127, kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten (termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya). Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Lurah melaksanakan urusan pemerintah yang di limpahkan oleh Bupati/Walikota dengan di sesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akutabilitas disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 keuangan kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang di alokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya. Asas umum dan struktur APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Daerah. Berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Serta, penetapan APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup deficit dan/atau memanfaatkan surplus APBD.

Kelurahan Cipedak merupakan salah satu kelurahan dari enam kelurahan di Kecamatan Jagakarsa termasuk dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan pecahan dari Kelurahan Ciganjur sebagaimana Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1746 tahun 1987 Tanggal 8 Mei 1990 ditetapkan bahwa Kelurahan Ciganjur dipecah menjadi Kelurahan Ciganjur dan Kelurahan Cipedak, dimana Kelurahan Cipedak memiliki luas wilayah 397,5. Pada bulan Februari 2014 telah diadakan peremajaan Pengurus RW dan Pengurus RT sehingga Kelurahan Cipedak terbagi menjadi 6 RW dan 64 RT sebanyak 38.140 jiwa. Pada tahun 2015 Kelurahan Cipedak juga terbagi menjadi 6 RW dan 64 RT sebanyak 39.976 jiwa.

Masa bakti Pengurus RT dan/atau Pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW dan/atau saat penandatanganan berita acara penyerahan tugas dan tanggung jawab dari panitia pemilihan kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Lurah, Ketua RT dan/atau Ketua RW hanya dapat dipilih untuk kali masa bakti dalam jabatan yang sama secara berturut-turut, penetapan 2 kali masa bakti dalam jabatan yang sama secara berturut-turut terhitung sejak pemilihan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016.

Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW berdasarkan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayahnya tugas dan fungsi RT dan RW, bukan merupakan uang kehormatan atau gaji melainkan sebagai penunjang, penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan dibebankan pada Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kelurahan.

Pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1674 Tahun 2018. Dengan besaran sebagai berikut: (1) RT

diberikan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan (b) RW diberikan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Setelah terjadi perubahan Keputusan Gubernur Nomor 184 tahun 2018 menjadi penatausahaan keuangan atas pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan berdasarkan bukti transfer dan daftar penerima. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui Musyawarah RT setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah, Rukun Warga disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah, Pengurus RT RW adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang yang ada di kepengurusan RT RW yang ditetapkan oleh Lurah.

RT dan/atau RW dibentuk untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur yang berdasarkan kerukunan, kegotong-royongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga dilingkungannya. Ketua RT dan/ atau Ketua RW mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT dan/ atau RW, mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT dan/ atau RW, mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga, menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya, membantu dan memperlancar Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan dan membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT.

Sebelum Intruksi Gubernur Nomor 256 Tahun 2015 di keluarkan seluruh transaksi pembayaran dana operasional RT RW masih secara tunai dan setelah dikelurkan Ingub diatas sehingga transaksi pembayaran dilakukan secara Non-Tunai (*Non Cash*) dan di himbau bagi seluruh RT dan RW membuka Rekening pada Bank DKI selaku bank yang memegang rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT RW sangat penting dalam kegiatan operasional atau anggaran APBD maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT RW dan hasilnya peneliti akan menuangkan dalam laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “**Analisis Sistem Pembayaran Dana Operasional RT dan RW Kelurahan Cipedak Tahun 2015-2016**”.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Sistem dan Pembayaran**

Pengertian Sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3), "Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar." Menurut Mulyadi (2016:5), "Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan pengertian pembayaran menurut UU No. 23 Pasal 1 (1996:6), "Pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindah dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi."

### **Sistem Pembayaran Tunai (*Cash*)**

Transaksi tunai merupakan transaksi yang menggunakan alat transaksi berupa “uang kertas dan logam”. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal yang memfasilitasi transaksi tunai masyarakat.

### **Sistem Pembayaran Non Tunai**

Sistem pembayaran non tunai instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan Kartu, Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.

## **METODE PENELITIAN**

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik Setyadin

Gunawan (2013:160). Menurut Indah Pertiwi (2016:90) Wawancara peneliti lebih mendapat informasi yang jelas. Menurut Sugiyono (2013:240) "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*Life Histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

### **Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data Sugiyono (2013:224). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang dilakukan peneliti ada dua yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Data yang akan digali dalam wawancara ini adalah data tentang Sistem Pembayaran Dana Operasional RT dan RW Kelurahan Cipedak. Pada saat wawancara menggunakan tanya jawab secara langsung.

#### **2. Dokumentasi**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan cara memanfaatkan dokumen seperti SPM, SP2D dan monev. Dokumen tersebut digunakan untuk melihat perbedaan pembayaran dana operasional secara tunai dan non-tunai.

#### **3. Teknik wawancara**

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif alasannya karena data dan informasi yang dikumpulkan lebih banyak keterangan atau penjelasan yang bukan angka-angka. Metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau kesan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Boy dan Taylor, 2005:36).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Sistem Pembayaran Dana Operasional RT dan/atau RW Kelurahan Cipedak Tahun 2015-2016 Secara Tunai dan Non-Tunai.**

#### **1. Penerapan Secara Tunai**

SPJ, PPTK, SPP, SPM, KASDA, REK. KEL, BENDAHARA KEL, BANK, BENDAHARA KEL, RT DAN RW.

#### **2. Penerapan Secara Non-Tunai**

PPTK, SPP, SPM, KASDA, REK. KEL, BENDAHARA KEL, RT DAN RW, SPJ

### **Kekurangan/Kelebihan Sistem Pembayaran Dana Operasional RT dan/atau RW Secara Tunai dan Non-Tunai.**

#### **Kekurangan Secara Tunai**

- Lama dalam pengurusan surat tanggung jawaban (SPJ), Timbulnya antrian pada saat pengambilan dana operasional tersebut oleh RT dan/atau RW.

#### **Kekurangan Secara Non-Tunai**

Ketidak kevalidan nomor rekening yang dituju dari salah satu RT dan/atau RW, Sering terjadi *offline* pada saat ingin melakukan penarikan uang di ATM.

#### **Kelebihan Secara Tunai**

Bisa langsung digunakan atau dialokasikan sesuai dengan kebutuhan tanpa antri di ATM, Terjalannya silaturahmi dengan baik antara RT dan/atau RW dan dengan pihak kelurahan.

#### **Kelebihan Secara Non-Tunai**

Lebih aman dikarenakan tidak memegang uang secara *cash* dengan jumlah yang lumayan besar, Lebih efisien dan mudah.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Sistem Pembayaran Dana Operasional RT dan/atau RW Kelurahan Cipedak Tahun 2015-2016 Secara Tunai dan Non-Tunai.**

#### **1. Penerapan Secara Tunai**

SPJ para RT dan RW harus memberikan SPJ terdahulu ke PPTK, PPTK Menerima SPJ yang diberikan oleh RT dan RW selanjutnya diberikan ke bendahara untuk membuat SPP, SPP dibuat bendahara untuk melakukan SPM, SPM yang akan di tanda tangan oleh sekretaris untuk mengajukan ke Kasda untuk melakukan pencairan, setelah cair masuk kedalam rekening kelurahan dan melakukan pengecekan apabila sudah cair bendahara menghubungi pihak bank untuk melakukan pemesanan uang, ketika uang sudah siap untuk di ambil bendahara datang ke bank untuk pengambilan dengan membawa cek, setelah itu kembali kekelurahan untuk memisahkan sesuai dengan nominal masing-masih RT dan RW, setelah selesai bendahara menghubungi RT dan RW untuk mengambil dana operasional tersebut.

#### **2. Secara Non-Tunai**

PPTK menyiapkan list nama RT dan RW se Kelurahan Cipedak untuk memberikan ke bagian bendahara dan membuat SPP, setelah SPP selesai diserahkan kes SPM yaitu sekretaris selanjutnya ke kasda untuk melakukan pencairan, setelah cair bendahara mengecek kedalam sistem dan bendahara melakukan transfer ke rekening masing-masing RT dan RW, tahap trakhir para RT dan RW datang kekelurahan untuk menandatangani bukti bahwa sudah menerima dana operasional tersebut.

### **Kekurangan/Kelebihan Sistem Pembayaran Dana Operasional RT dan/atau RW Secara Tunai dan Non-Tunai.**

#### **1. Kekurangan Secara Tunai**

Lama dalam pengurus surat tanggung jawaban (SPJ) Pada saat pengambilan dana operasional tersebut tidak bisa diwakilkan dengan siapa pun, Sering terjadi salah perhitungan uang pada saat memisahkan ke dalam amplop RT dan/atau RW dikarenakan ketidak telitian atau ketidak sabaran bendahara ataupun staf-staf yang membantu dalam pemisahan uang tersebut.

#### **2. Kekurangan Secara Non-Tunai**

Ketidak kevalidan nomor rekening yang dituju dari salah satu RT dan/atau RW Terkadang para RT dan/atau RW tidak teliti dalam mengisi data, sering terjadi sitem *offline* pada saat ingin melakukan penarikan uang di ATM tidak selamanya mesin ATM itu selalu beroperasi/*online* terkadang pada saat dibutuhkan terjadi sistem *offline*.

#### **3. Kelebihan Secara Tunai**

Bisa langsung digunakan atau dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan oleh RT/RW dana yang telah diberikan oleh pemerintah bisa langsung digunakan karena sistem tunai diberikan setiap 3 bulan sekali, terjalannya silaturahmi dengan baik antara RT dan/atau RW dan dengan pihak kelurahan.

#### **4. Kelebihan Secara Non-Tunai**

Lebih aman dikarenakan tidak memegang uang secara *cash* dengan jumlah yang lumayan besar dengan adanya akun rekening Bank DKI RT dan/atau RW bisa menyimpan atau bahkan mengambil sebagian dana pemerintah yang telah diberikan.

## **KESIMPULAN**

Sistem pembayaran dana operasional RT dan/atau RW Kelurahan Cipedak secara tunai pada tahun 2015 dilakukan pencairan per tiga bulan dan memiliki langkah-langkah yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem pembayaran secara non-tunai, membutuhkan waktu pada saat pengambilan dapat mempengaruhi waktu yang harus digunakan untuk penyaluran dana operasional RT dan/atau RW yang berakibat pada ketidak efisienan maupun keefektifitasan waktu pemrosesan sampai dana operasional itu dapat disalurkan kepada RT dan/atau RW. Sistem pembayaran dana operasional RT dan/atau RW Kelurahan Cipedak secara non-tunai pada tahun 2016 dilakukan pencairan setiap bulannya, lebih ringkas dan juga jejak digital yang timbul akibat transaksi non-tunai

membuat transparansi.

Kekurangan sistem pembayaran dana operasional RT dan/atau RW Kelurahan Cipedak, antara lain: a. Secara Tunai, timbulnya antrian pada saat pengambilan dana operasional tersebut oleh RT dan/atau RW, keamanan pada saat pencairan dan pemindahan dana dari Bank DKI cabang kecamatan sampai dengan kekelurahan. b. Secara Non-Tunai, ketidak kevalidan nomor rekening yang dituju dari salah satu RT dan/atau RW, Sering terjadi *offline* pada saat ingin melakukan penarikan uang di ATM, jaringan internet mengalami gangguan ketika ingin melakukan transfer ke RT dan/atau RW.

Kelebihan sistem pembayaran dana operasional RT dan/atau RW Kelurahan Cipedak, antara lain: a. Secara Tunai, bisa langsung digunakan atau dialokasikan sesuai dengan kebutuhan tanpa antri di ATM, terjalannya silaturahmi dengan baik antara RT dan/atau RW dan dengan pihak kelurahan. b. Secara Non-Tunai, lebih aman dikarenakan tidak memegang uang secara *cash* dengan jumlah yang cukup besar, lebih efisien dan mudah, mempersingkat/ menghemat waktu, bisa disimpan terlebih dahulu tanpa memegang uang *cash*, transaksi terekam dalam perbankan (Rekening Koran) dan lebih terperinci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, Sri. (2003). *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF OGM.
- Carter dan Usry. (2004). *Akuntansi Biaya*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasibuan. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Info Perbankan. Melani Oktarina. (2018). “ APA YANG DIMAKSUD DENGAN ATM DAN FUNGSINYA?” <https://www.infoperbankan.com/umum/apa-yang-dimaksud-dengan-atm.html> “Diakses tanggal 4 April 2019”
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pertiwi, I., & Marsigit, M. (2017). Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika SMP di Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 4(2), 153-165.
- Pohan. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.CV
- Tendi & Rahayu, Sri. (2007). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu